

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan langkah nyata yang harus dilaksanakan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pada Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB dalam 1 (satu) tahun ke depan. Rencana Kerja (RENJA) dituangkan dalam program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Kerja (RENJA) Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB tahun 2016 merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat guna menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015;
3. Untuk mengarahkan semua potensi yang ada secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsi yang diemban sehingga dapat mencapai sasaran kegiatan yang dituangkan pada tahun 2016.

b. Tujuan

1. Menyediakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan mensinkronkan arah rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi-misi Renstra Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Menjadi pedoman pada Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.
5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. NTB Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

- 2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Renja Tahun 2015
- 2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015
- 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Kebijakan
- 3.2. Usulan Program dan Kegiatan
- 3.3. Program dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian

BAB IV INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 4.1. Indikator Kinerja Biro Administrasi Perekonomian
- 4.2. Pendanaan Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

2.1. Visi Misi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana yang diamanatkan tersebut di atas maka perlu penetapan visi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Visi tersebut akan memberikan fokus kepada pencapaian sesuatu dan bukan merupakan jawaban atas suatu masalah, akan tetapi lebih pada sarana pemecahan masalah yang dihadapi organisasi sehingga secara menyeluruh visi yang akan ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan.

Visi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: *“Terwujudnya Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal”*.

Dari pernyataan visi tersebut di atas terkandung makna sebagai berikut :

1. Biro Administrasi Perekonomian mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan keharmonisan / sinergitas antara instansi terkait, swasta, dan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi Biro Administrasi Perekonomian menyiapkan kebijakan dan perumusan bidang Sarana Perekonomian, Informasi, Investasi dan Produksi Daerah
3. Pertumbuhan ekonomi akan berkualitas apabila laju inflasi dapat dikendalikan.

Untuk mencapai visi Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mendorong kelancaran koordinasi untuk menunjang peningkatan produksi daerah.
2. Meningkatkan kesehatan Perusda dan BUMD guna menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan PAD.

3. Mendorong keterpaduan peningkatan investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan ketersediaan data perekonomian daerah sebagai bahan rumusan kebijakan.

2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2015

Dari beberapa program tersebut di atas secara makro dapat dilihat adanya kemajuan pada pembangunan sektor ekonomi di Nusa Tenggara Barat, hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sampai dengan triwulan III tahun 2015 sebesar 6,14% (yoy). Jika dilihat dari struktur pertumbuhan ekonomi non tambang maka sektor pertanian, perdagangan, jasa dll mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena didukung oleh meningkatnya hasil-hasil pertanian serta meningkatnya sektor perdagangan jasa dan lain-lain.

Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Nopember Tahun 2015 sebesar 2,47 masih berada di atas inflasi nasional yang mencapai 2,43 %. Namun demikian, beberapa kendala yang masih dirasakan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya koordinasi antar sektor pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan sehingga masih banyak kegiatan yang tumpang tindih.
- b. Belum semua komoditi unggulan Nusa Tenggara Barat memenuhi standar kualitas ekspor, sehingga banyak produk unggulan Nusa Tenggara Barat yang belum mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
- c. Masih sulitnya masyarakat memperoleh modal kerja terutama masyarakat di pedesaan yang tidak mempunyai akses dengan perbankan.
- d. Adanya calon investor yang masih belum jelas untuk menanamkan modalnya terutama di sektor kepariwisataan
- e. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan tidak sesuai kualifikasi sehingga banyak angkatan kerja yang masih belum memperoleh pekerjaan.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait pada bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Mendorong SKPD teknis agar melaksanakan pembinaan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan terhadap pelaku usaha agar mereka mampu meningkatkan kualitas produknya sesuai dengan standar yang dikehendaki pasar baik dalam maupun luar negeri.

- c. Pemerintah harus mampu menjamin tersedianya modal kerja bagi masyarakat kecil yang tidak mempunyai akses dengan bank melalui lembaga penjaminan yang sekarang ini Peraturan Daerahnya telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d. Mendorong SKPD teknis untuk memperjelas status investor yang sudah mengajukan izin rekomendasi khususnya pada sektor pariwisata apakah izin rekomendasinya akan diperpanjang atau dicabut sehingga bisa diberikan kepada calon investor lain yang benar-benar serius mau berusaha di Nusa Tenggara Barat. Artinya kepada calon investor yang bermasalah harus diberikan sanksi yang tegas.
- e. Mendorong SKPD teknis untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terutama bagi angkatan kerja di pedesaan untuk meningkatkan SDM mereka sehingga mereka menjadi calon tenaga kerja yang terampil dan siap untuk bersaing.

2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan anggaran keuangan dan fisik terhadap pelaksanaan RENJA Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.

Evaluasi RENJA dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan RENJA yang direncanakan. Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan RENJA Tahun 2015, dititikberatkan pada pencapaian realisasi penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hasil Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 maka dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 9 (sembilan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan dana yang

bersumber dari APBD sebesar Rp. 4.871.205.500,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 3.957.375.500,- dan belanja tidak langsung Rp. 913.830.000,-

2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Isu-isu strategis dan masalah mendasak pada pembangunan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

a. Kepastian hukum dalam berusaha

Masih lemahnya penegakan hukum di masyarakat terutama oleh para penegak hukum, sehingga berdampak kepada kurangnya rasa aman untuk melakukan investasi di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Stabilitas ekonomi, politik, sosial dan keamanan

Lemahnya eksternalitas wilayah Nusa Tenggara Barat, salah satu contoh wilayah Nusa Tenggara Barat yang dikatakan berada dalam segitiga emas pariwisata dunia yakni Bali, Komodo, Makassar/Toraja, namun Nusa Tenggara Barat belum dapat mengambil peran yang optimal.

c. Infrastruktur yang memadai

Ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota dan antar wilayah masih mewarnai perjalanan pembangunan daerah. Kurangnya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana, distribusi sumber daya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan ekonomi unggulan cukup signifikan mempengaruhi keadaan ini.

d. Kondisi ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan ini meliputi :

- Profesionalisme aparatur pemerintah tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan aparatur birokrasi kepada masyarakat masih rendah. Selain itu juga kinerja aparatur dan standar kompetensi yang diterapkan kepada seluruh tingkatan aparatur belum berjalan dengan baik.
- Masih belum siapnya masyarakat menerima arus globalisasi terutama dampak negatif. Hal ini tercermin dari berbagai gejolak yang terjadi didalam masyarakat terutama di daerah pedesaan.

e. Kurang validnya data berapa banyak produksi hasil pertanian kita yang keluar daerah serta berapa banyak yang masuk sehingga diperoleh gambaran berapa kebutuhan masyarakat yang surplus serta berapa yang devisit.

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, dirumuskan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan pada Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam menumbuhkan perekonomian daerah, hal ini karena kurangnya informasi tentang potensi Sumber Daya Alam (SDA)
2. Masih kurangnya kerjasama antar daerah dalam bidang perekonomian
3. Kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Belum terkelolanya secara optimal BUMD yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan pelayanan masyarakat.
5. Lemahnya pelayanan birokrasi khususnya yang terkait pengurusan perizinan/rekomendasi.
6. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
7. Masih kurangnya data ketersediaan kebutuhan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pasokan pada saat bulan-bulan tertentu yang berakibat pada terjadinya inflasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana visi misi Renstra Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan, maka untuk keberhasilan pencapaiannya perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja Biro Administrasi Perekonomian Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perumusan kebijakan pembangunan perekonomian yang lebih berkualitas.
- 2) Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengembangan kelembagaan ekonomi.
- 3) Meningkatkan koordinasi lintas sektor bidang ekonomi.
- 4) Meningkatkan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dan BUMD sehingga diperoleh BUMD yang sehat.
- 5) Meningkatkan pelayanan informasi perekonomian, terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Meningkatkan evaluasi terhadap administrasi perekonomian.
- 7) Meningkatkan intensitas koordinasi produksi budidaya Sapi, Jagung dan Rumput Laut.
- 8) Meningkatkan intensitas koordinasi produksi olahan.
- 9) Meningkatkan intensitas koordinasi cukai rokok dan rokok ilegal.
- 10) Meningkatkan efektifitas koordinasi ketersediaan BBM/Energi.
- 11) Meningkatkan efektifitas koordinasi usaha perekonomian daerah.
- 12) Meningkatkan kualitas Perusda dan BUMD.
- 13) Meningkatkan efektifitas koordinasi kelembagaan perekonomian daerah.
- 14) Meningkatkan efektifitas koordinasi pengembangan lembaga keuangan bank.
- 15) Meningkatkan efektifitas koordinasi pengembangan lembaga keuangan non bank.
- 16) Meningkatkan efektifitas koordinasi pengembangan investasi.
- 17) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
- 18) Meningkatkan monitoring dan evaluasi data dan informasi perekonomian.
- 19) Meningkatkan administrasi ketatausahaan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Keberhasilan mencapai berbagai sasaran organisasi lebih menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan unit kerjanya.

Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja organisasi sebagai alat untuk memacu agar semua bagian organisasi sadar dan kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan.

Agar sasaran ini efektif, maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi. Adapun Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya rapat koordinasi produksi olahan
2. Terwujudnya monev produksi olahan
3. Terwujudnya rapat koordinasi produksi budidaya
4. Terwujudnya monev produksi budidaya
5. Terwujudnya rapat koordinasi bahan galian dan energi
6. Terwujudnya monev bahan galian dan energi
7. Tersosialisasinya cukai rokok dan rokok ilegal
8. Terpantau dan terawasinya cukai rokok dan rokok ilegal
9. Terwujudnya rapat koordinasi cukai rokok ilegal
10. Terlaksananya koordinasi peningkatan usaha perekonomian daerah
11. Terlaksananya monev peningkatan usaha perekonomian daerah
12. Terlaksananya pembinaan Perusda dan BUMD
13. Terlaksananya monev kinerja Perusda dan BUMD
14. Terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengawasan Perusda dan BUMD
15. Terlaksananya koordinasi peningkatan kelembagaan perekonomian daerah.
16. Terlaksananya monev peningkatan kelembagaan perekonomian daerah.
17. Terwujudnya rapat koordinasi pengembangan lembaga keuangan bank.

18. Terwujudnya monev pengembangan lembaga keuangan bank.
19. Terwujudnya rapat koordinasi peningkatan peranan lembaga keuangan non bank.
20. Terwujudnya monev pengembangan lembaga keuangan non bank
21. Terwujudnya rapat koordinasi pengembangan investasi.
22. Terwujudnya monev pengembangan investasi.
23. Terwujudnya rapat koordinasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
24. Terwujudnya monev peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
25. Terwujudnya rapat koordinasi pengembangan ekonomi daerah.
26. Terwujudnya monev pengembangan ekonomi daerah
27. Terwujudnya data statistik pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
28. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
29. Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

3.2. Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran di atas, selanjutnya perlu dirumuskan strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi-misi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain ; struktur organisasi yang sangat memadai, cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dan kapasitas SDM yang memadai.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata hingga saat ini masih dijumpai berbagai kelemahan internal yang harus ditekan serendah mungkin antara lain, rendahnya ketersediaan data perekonomian yang akurat, masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi.

Disisi lain, hasil analisis terhadap faktor eksternal menemukan berbagai peluang antara lain, tingginya kepercayaan Gubernur terhadap perkembangan teknologi informasi, globalisasi yang akan membuka peluang kerjasama pembangunan. Berbagai ancaman eksternal yang perlu diantisipasi antara lain berkembangnya perusahaan multinasional yang merambah pasar domestik, diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang

memperbolehkan keluar masuknya barang dari luar secara bebas serta melemahnya kondisi ekonomi global terutama di kawasan Asia.

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, treats*) dari hasil tersebut kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta penelitian/pengkajian strategis pembangunan Tahun 2016 adalah koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi perekonomian daerah.

3.3. Kebijakan

Kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Adapun kebijakan umum Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Mendorong dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan perekonomian daerah.
2. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan.

3.4. Program dan Kegiatan Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB

3.4.1. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Program dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat-menyurat.
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - g) Penyediaan makanan dan minuman.
 - h) Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - i) Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b) Pengadaan Mebeleur
 - c) Pengadaan UPS, komputer dan alat-alat elektronik
 - d) Pengadaan AC/Alat Pendingin
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

- 5) Program Unggulan Dan Strategis Lain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).
 - a) Sosialisasi cukai rokok dan rokok ilegal
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah
 - a) Monitoring dan Evaluasi Produksi Budidaya
 - b) Monitoring dan Evaluasi Bahan galian dan Energi
- 7) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - a) Penataan Kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah dan Barang Milik Daerah
 - b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Perekonomian Daerah
 - c) Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian Daerah
- 9) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a) Pengembangan Investasi
- 10) Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian
 - a) Pendataan Statistik Perekonomian.
 - b) Pengendalian Inflasi Daerah.
 - c) Pengembangan Ekonomi Daerah.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

4.1. Indikator Kinerja Biro Administrasi Perekonomian

Indikator kinerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi NTB berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran, maka Indikator Kinerja Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

No	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Pertumbuhan Ekonomi (Non Tambang)	Persen	5,85-6,00	Indikator RPJMD
2	Peningkatan Produksi Daerah	Persen	5,85-6,00	
3	Perusahaan Daerah dan BUMD yang Sehat	Perusahaan	11	
4	Jumlah Kebijakan tentang Perusahaan Daerah dan BUMD	Dokumen	1	
5	Peningkatan Investasi	Persen	8,50	

Pertumbuhan ekonomi non tambang merupakan indikator kinerja yang merupakan tanggung jawab Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 31 indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Biro Administrasi Perekonomian Tahun 2016

No	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Anggaran		Sumber Dana	Ket
				Tolok Ukur	Target		Jenis	Nilai		
1	1.20.03.05.78	Program peningkatan dan pengembangan produksi daerah					BL	672.175.000	APBD	
							78,02	a) Koordinasi, monitoring dan evaluasi produksi budidaya	- Pencatatan arus keluar masuk komoditas strategis pangan	Tercatatnya 18 jenis komoditas strategis pangan
				- Sosialisasi penggunaan pupuk untuk tembakau virginia	Tersosialisasinya penggunaan pupuk untuk tembakau virginia	50 org	10 Kab/Kota			
				- Koordinasi dan Monev tentang Produksi budidaya	Terlaksananya koordinasi, monev tentang produksi budidaya	10 Kali	Kab/kota se- NTB			
				- Penyusunan buku data base komoditas strategis pangan di Provinsi NTB	Tersusunnya buku data base komoditas pangan Provinsi NTB	50 buku	Proviinsi			
				- Workshop bagi petugas pencatat arus komoditas strategis pangan	Terlatihnya petugas pencatat arus komoditas strategis pangan	30 org	Provinsi			
		78,03	b) Koordinasi, monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi	- Koordinasi monev bahan galian dan energi	Terpantaunya kebutuhan BBM dan energi	10 KI	10 Kab/Kota	BL	127.975.000	APBD
				- Sosialisasi penggunaan bahan bakar alternatif	Peserta sosialisasi penggunaan bahan bakar alternatif	90 org	3 Kabupaten			
				- Penyusunan buku data base bahan galian C	Tersedianya data base usaha produk olahan yang valid	50 buku	6 Kabupaten			

			- FGD penggunaan energi baru/terbarukan	Terwujudnya penggunaan energi baru/terbarukan	5	Provinsi dan Kab/Kota				
2	1.20.03.05.77 77,01	Program unggulan dan strategis lain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) - Sosialisasi cukai rokok ilegal dan rokok ilegal	- Sosialisasi cukai rokok ilegal pada industri hasil tembakau - Koordinasi pemantauan cukai rokok ilegal - FGD evaluasi pengembangan produk olahan - Desiminasi penggunaan bahan tambahan makanan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pita cukai asli/ilegal Koordinasi antara Pemprov/Pemkab dan sektor terkait Meningkatnya jenis produk olahan Pelaku usaha memahami penggunaan bahan tambahan makanan	600 org 50 org 60 org 90 org	9 Kab/kota Provinsi Provinsi Provinsi	BL	500.000.000	APBD	
							BL	376.100.000	APBD	
3	1.20.03.05.79 79,01	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan - Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD	- Terwujudnya pengelolaan Perusda dan BUMD yang Profesional - Tertatanya kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD	Meningkatnya Jumlah Perusda dan BUMD yang Profesional Jumlah kebijakan yang tertata	1 Dok	Provinsi	BL	524.000.000	APBD	
							BL	524.000.000	APBD	
4	1.20.03.05.80 80,01	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah a) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah dan BUMD	- Terwujudnya Perusahaan Daerah dan BUMD yang sehat - Terlaksananya pembinaan dan Monev Perusahaan Daerah dan BUMD	Jumlah Perusda dan BUMD yang sehat Jumlah Perusda dan BUMD yang terbina, termonitor dan terevaluasi	12 Perusahaan	Provinsi	BL	636.241.900	APBD	
							BL	507.369.400	APBD	

	80,03	b) Monev kegiatan usaha perekonomian daerah	- Terlaksananya koordinasi dan monev usaha perekonomian daerah	koordinasi dan monev yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	Provinsi	BL	67.635.000	APBD	
	80,04	c) Monev kelembagaan perekonomian daerah	- Terlaksananya koordinasi dan monev kelembagaan perekonomian daerah	koordinasi dan monev yang dilaksanakan	10 Kab/Kota	Provinsi	BL	61.237.500	APBD	
5	1.20.03.05.81	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi					BL	415.614.000	APBD	
	81,01	- Pengembangan Investasi	- Peningkatan investasi	Pertumbuhan investasi	11,50	Provinsi NTB	BL	415.614.000	APBD	
6	1.20.03.05.83	Program pengembangan data dan informasi					BL	591.726.000	APBD	
	83,01	a) Pendataan statistik perekonomian	- Tersedianya data perekonomian daerah	Buku data perekonomian	4 Jenis	Provinsi	BL	149.193.000	APBD	
	83,02	b) Pengendalian inflasi daerah	- Terkendalinya inflasi daerah	Laporan kegiatn	1 laporan	Provinsi	BL	208.833.000	APBD	
	83,03	c) Pengembangan ekonomi daerah/lokal	- Terwujudnya Forum PEL/FED di 10 Kab/Kota	Laporan kegiatan	1 laporan	Provinsi	BL	233.700.000	APBD	
7	1.20.03.05.01	Program pelayanan administrasi perkantoran					BL	313.611.600	APBD	
	01.01	a) Penyediaan jasa surat menyurat	- Tersedianya jasa surat menyurat.	Jasa surat menyurat yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	3.250.000	APBD	
	01.02	b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	18.000.000	APBD	
	01.07	c) Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Tersedianya jasa administrasi keuangan.	Jasa administrasi keuangan yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	56.544.000	APBD	
	01.10	d) Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor.	Alat tulis kantor yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	11.553.600	APBD	

	01.11	e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	5.500.000	APBD	
	01.15	f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	11.952.000	APBD	
	01.17	g) Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman.	makanan dan minuman yang tersedia	12 Bln	Mataram	BL	10.400.000	APBD	
	01.18	h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi.	koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan.	12 Bln	Jakarta/Provinsi Lainnya	BL	80.265.000	APBD	
	01.19	i) Penyediaan jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran	- Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran.	Jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia.	12 Bln	Mataram	BL	30.845.000	APBD	
	01.20	j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	- Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi.	Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan.	10 Kab/Kota	Provinsi NTB	BL	85.302.000	APBD	
8	1.20.03.05,02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					BL	556.489.900	APBD	
	02.24	a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	- Terpeliharanya kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 unit	Mataram	BL	125.060.000	APBD	
	02.30	b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.	- Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor.	Peralatan kantor yang terpelihara	36 unit	Mataram	BL	12.405.500	APBD	
	02.10	c) Pengadaan mebeulair.	- Terlaksananya pengadaan meublair.	Jumlah mebeulair	1 set	Mataram	BL	10.224.400	APBD	

	02.11	d) Pengadaan UPS/stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik.	- Terlaksananya pengadaan komputer dan alat-alat elektronik.	Komputer dan printer	6 unit	Mataram	BL	38.800.000	APBD	
	02.12	e) Pengadaan AC/alat pendingin	- Tersedianya AC/alat pendingin	AC dan kulkas	2 unit	Mataram	BL	20.000.000	APBD	
	02.05	f) Pengadaan kendaraan dinas kantor.	- Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas.	Jumlah kendaraan dinas	6 unit	Mataram	BL	350.000.000	APBD	
9	1.20.03.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					BL	79.454	APBD	
	06.05	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	- Tersedianya dokumen rencana kerja dan laporan	Dokumen Rencana Kerja dan Laporan	5 Dok	Mataram	BL	79.454	APBD	
10	1.20.03.05.07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah					BL	10.298.200	APBD	
	07.01	- Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	- Terwujudnya/manajemen/pengelolaan aset daerah	Data aset	12 bulan	Mataram	BL	10.298.200	APBD	
		JUMLAH						4.299.610.600		

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kinerja (RENJA) Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Renstra Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 – 2018 yang disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat

Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa berusaha untuk menerapkan tiga pilar dari prinsip *Good Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sangat disadari bahwa dokumen Rencana Kerja Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 ini bukan suatu dokumen yang sempurna, melainkan masih memiliki kelemahan. Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan namun diyakini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan di Nusa Tenggara Barat khususnya Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.